

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah *fee* adalah suatu permasalahan yang dilematis karena auditor mendapat *fee* dari perusahaan klien yang diaudit, Dimana di satu sisi auditor harus independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Sudarno, 2013).

Menurut Gatot, pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* saja. Pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan *brand/quality focus*. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan di Indonesia kebanyakan masih menggunakan pertimbangan pemilihan KAP melalui *audit fee*-nya daripada nama besar atau kualitas dari KAP tersebut. Selain itu, masih banyak terjadi pro kontra antara orang yang mendukung adanya aturan tentang *fee* audit dengan orang yang menolak adanya aturan tentang *fee* audit (Aryani, 2011; Sudarno, 2013).

Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*agent*) bertindak atas kepentingannya sendiri. *Principal* berusaha meningkatkan laba agar pembagian dividen yang diterimanya semakin besar. Sedang disisi lain, *agent* dapat melakukan tindakan kecurangan dengan cara memanipulasi laba agar kompensasi atas kinerjanya juga semakin besar. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan asimetri informasi. Dalam

perusahaan pemegang saham menyerahkan modal yang dimilikinya kepada direksi untuk dikelola. Sedangkan dewan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun, konflik antara pemilik modal dan pengelola tetap dapat ditemukan walaupun mereka sudah terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Hal ini dijelaskan dalam teori keagenan (Wibowo dan Rohman, 2013).

Besarnya fee audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah *corporate governance*. Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, diantaranya adalah komisaris independen dan komite audit.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *fee* audit. Orang yang pertama kali memformulasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit adalah Simunic (1980). Ia membuat model yang menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit.

Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris, kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi eksternal bagi perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Auditing No. 380 mengatur komunikasi antara akuntan public (auditor

eksternal) dengan komite audit. Standar ini menyatakan komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tertulis terkait dengan tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit, kebijakan akuntansi, konsultasi dengan akuntan lain, sampai pada kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit (Wibowo, 2014).

Ikatan Komite Audit Indonesia (2004) mengatakan bahwa komite audit bertugas mendampingi dewan komisaris dalam fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen resiko, dan fungsi audit internal serta audit eksternal, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada *shareholders* dalam menjamin adanya mekanisme pengawasan dan pengelolaan (Widiasari dan Prabowo, 2008).

Disebutkan Beasley (1996), bahwa Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah (Sudarno, 2013).

Hay, *et al.* menyatakan bahwa anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar juga anak perusahaan yang tersebar. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan positif yang signifikan, maka perusahaan pusat akan mengembangkan juga anak

perusahaannya agar terjadi kontinuitas yang positif dari atas hingga ke bawah. Penelitian yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell (2010) menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor (Immanuel, 2014).

Profitabilitas terkait dengan efisiensi penggunaan asset dan sumber daya lain oleh perusahaan dalam operasinya. Menurut Joshi dan Al-Bastaki (2000), menyatakan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien menghasilkan pengembalian yang tinggi dari asset (Fachriyah, 2011).

Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi cenderung untuk membayar audit tinggi karena keuntungan yang tinggi mungkin memerlukan pengujian yang ketat, dan perusahaan dengan keuntungan tinggi memerlukan pengujian validitas untuk pengakuan pendapatan dan biaya sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam pelaksanaan audit tersebut. Waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan audit akan berdampak pada tingginya fee audit yang akan ditetapkan oleh auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh (Fachriyah, 2011).

Hay, *et al* menyatakan bahwa anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar juga anak perusahaan yang tersebar. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan positif yang signifikan, maka perusahaan pusat akan mengembangkan juga anak perusahaannya agar terjadi kontinuitas yang positif dari atas hingga ke bawah. Penelitian yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell (2010) menunjukkan

bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor (Immanuel, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widiyanti dan Prabowo (2008) dengan judul PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN DAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FEE* AUDIT pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2006 sampai 2007. Pertimbangan replikasi adalah masih jarangya penelitian mengenai *fee* audit di Indonesia. Variable independen yang digunakan adalah dewan komisaris independen, komite audit, jumlah anak perusahaan serta profitabilitas. Dalam penelitian ini menambah variabel jumlah anak perusahaan dan variabel profitabilitas yang menjadikannya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penggunaan variabel jumlah anak perusahaan dengan tujuan untuk melihat apakah jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan memiliki pengaruh terhadap besarnya *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pertimbangan penggunaan profitabilitas dari penelitian Fachriyah (2011) yang diukur dengan tingkat pengembalian asset (*ROA*), antara lain : (1) tingkat pengembalian asset oleh perusahaan dinilai dapat memberikan gambaran mengenai profitabilitas perusahaan yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengaudit klien, (2) penelitian mengenai tingkat pengembalian asset terhadap *fee* audit masih jarang dilakukan. Objek penelitian yang akan digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2013 sampai 2014 dengan pertimbangan keterbaruan dan luas cakupan data, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*, JUMLAH ANAK PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP *FEE* AUDIT”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh positif antara keberadaan komisaris independen, keberadaan komite audit, jumlah anak perusahaan dan profitabilitas terhadap *fee* audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif keberadaan komisaris independen, keberadaan komite, jumlah anak perusahaan dan profitabilitas terhadap *fee* audit.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat dibidang teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh struktur *corporate governance* ,anak perusahaan dan profitabilitas terhadap *fee* audit. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengklarifikasikan penelitian sebelumnya dan dapat menjadi salah satu dasar bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat dibidang praktis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai bagian struktur *corporate governance* apa yang dapat berpengaruh terhadap *fee* audit dan bagaimana profitabilitas dapat mempengaruhi kinerja audit yang dalam menghasilkan laporan audit yang nantinya akan menentukan besarnya *fee* audit. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk penelitian mendatang, serta dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit dan anak perusahaan terhadap besarnya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan.